



## KATA PENGANTAR

*Puji dan Syukur kami ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua, sehingga penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2021 Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dapat terselesaikan pada waktu yang telah ditentukan.*

*Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), dinyatakan bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada Pemerintah. Dengan demikian, Penyampaian laporan ini merupakan kewajiban konstitusional sebagaimana telah diatur dalam Pasal 69 ayat 1 dan pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Untuk itu, dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan tersebut, Biro Administrasi Pembangunan sebagai Unit Kerja di bawah naungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat berkewajiban pula menyampaikan LKPJ untuk memberikan laporan pertanggungjawaban terhadap kinerja Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2021 kepada Gubernur sekaligus menjadi bahan informasi atas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dijalankan oleh Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat secara transparan dan akuntabel.*

*Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LKPJ ini masih terdapat kelemahan dan kekurangan baik dalam metode penyajian maupun dalam kelengkapan datanya, oleh karena itu kami membuka diri untuk menerima masukan berupa kritik dan saran atas isi laporan ini demi kesempurnaan dalam penyusunan laporan untuk tahun-tahun berikutnya.*

*Kepada Tim Penyusun yang telah bekerja maksimal menyelesaikan penyusunan LKPJ ini, kami atas nama Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, semoga Allah SWT memberikan Rahmat-Nya bagi kita semua, Amiin.*

Pontianak, 24 Januari 2022

Plt. KEPALA BIRO ADMINISTRASI  
PEMBANGUNAN,

**Dra. ANA PAULA MACEDO DE SAUSA MOTA**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19640403 198503 2 015

**DAFTAR ISI**

Kata Pengantar		1
Daftar Isi		2
BAB I	Pendahuluan	3
1.1	Dasar Hukum	
1.2	Data Umum Perangkat Daerah	3
BAB II	Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan (APBD-P) Perangkat Daerah	8
BAB III	Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	11
BAB IV	Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Penugasan	17
BAB V	Penutup	18



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Dasar Hukum SKPD

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
3. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5)
4. Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat ( Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 110)

### 1.2 Data Umum Perangkat Dearah

Data umum perangkat daerah Biro Administrasi Pembangunan sebagai berikut :



#### a. Jumlah Pegawai

Merujuk kepada tugas dan fungsi serta tata kerja Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat ( Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 110), serta merujuk kepada Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dapat kami sampaikan bahwa nomenklatur Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat TIDAK dibentuk berdiri sendiri sesuai dengan Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan, akan tetapi Biro Administrasi Pembangunan merupakan perumus dan koordinator kebijakan daerah bidang pengendalian administrasi pembangunan daerah, pengendalian administrasi pembangunan wilayah, serta pelaporan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mendukung pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

Dengan demikian, Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam penyajian tentang jumlah pegawai dengan kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional pada Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat ini, TIDAK secara spesifik berdasarkan Urusan yang ditangani atau yang dijalani, melainkan secara global per SKPD.

Adapun komposisi mengenai jumlah pegawai dengan kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2021 disajikan berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) dalam bentuk table di bawah ini.



Tabel 1.1

Data Pegawai menurut Analisis Beban Kerja (ABK) Biro Administrasi Pembangunan  
 Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021

NAMA SATUAN ORGANISASI/JABATAN	STANDAR KEBUTUHAN SDM APARATUR (ABK)	ASN TAHUN 2021
1	2	3
Kepala Biro Administrasi Pembangunan	1	0
A. Kepala Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1	1
a. Kepala Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	1	1
1) Fungsional Tertentu	-	-
2) Fungsional Umum	3	3
b. Kepala Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	1	1
1) Fungsional Tertentu	-	-
2) Fungsional Umum	3	2
c. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro	1	1
1) Fungsional Tertentu	-	-
2) Fungsional Umum	16	8
B. Kepala Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	1	1
a. Kepala Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah I	1	1
1) Fungsional Tertentu	-	-
2) Fungsional Umum	4	4
b. Kepala Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah II	1	1
1) Fungsional Tertentu	-	-
2) Fungsional Umum	4	2
c. Kepala Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah III	1	1
1) Fungsional Tertentu	-	-
2) Fungsional Umum	-	3
C. Kepala Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	1	1
a. Kepala Sub Bagian Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	1	1
1) Fungsional Tertentu	-	-
2) Fungsional Umum	3	2
b. Kepala Sub Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1	1
1) Fungsional Tertentu	-	-
2) Fungsional Umum	2	3
c. Kepala Sub Bagian Kebijakan Pembangunan Daerah	1	1
1) Fungsional Tertentu	-	-
2) Fungsional Umum	4	3
<b>TOTAL</b>	<b>51</b>	<b>42</b>

**b. Realisasi Pendapatan**

Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Barat tidak menghasilkan pendapatan/PAD.



**c. Realisasi Belanja**

Tahun 2021 total pagu anggaran Biro Adminitrasi Pembangunan tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 841.244.380,00 dengan realisasi mencapai Rp.839.956.459,00 atau sekitar 99,85%. Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Langsung tersebut tersaji pada tabel 1.2 di bawah ini :



Tabel 1.2  
Anggaran dan Realisasi Belanja SKPD Tahun Anggaran 2021

Kode rekening	Instansi/Organisasi	Anggaran Belanja	Realisasi				Total Realisasi Belanja	%
			Realisasi Belanja Tidak Langsung	Jenis Belanja				
				Pemeliharaan	Barang & Jasa	Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	841.244.380,00	0	17.864.100,00	822.092.359,00	-	839.956.459,00	99,8

Tabel 1.3  
Anggaran dan Realisasi Belanja Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2021

Kode rekening	Uraian Program/Kegiatan	Anggaran Belanja (DPPA)	Realisasi				Total Realisasi Belanja	%
			Realisasi Belanja Tidak Langsung	Jenis Belanja				
				Pemeliharaan	Barang & Jasa	Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<b>171.067.216,00</b>	0	17.864.100,00	153.203.116,00	0	171.067.216,00	100
2.	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	<b>9.345.871,00</b>	0	0	9.345.871,00	0	9.345.871,00	100
3.	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	<b>660.831.293,00</b>	0	0	659.543.372,00	0	659.543.372,00	99,8



**BAB II**  
**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PERUBAHAN**  
**(APBD-P) PERANGKAT DAERAH**

Alokasi Dana untuk pembiayaan seluruh kegiatan Biro Administrasi Pembangunan yaitu sebesar Rp. 841.244.380,00 dari APBD (DPPA) dengan realisasi sebesar Rp.839.956.459,00 atau sekitar 99,85%. Adapun rincian realisasi program/kegiatan tersebut dijabarkan pada tabel berikut :

**Tabel 2.1**  
**Realisasi Anggaran Tahun 2021 Dalam Mewujudkan Kinerja Organisasi**

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN/BELANJA PERUBAHAN 2021		
		PAGU	REALISASI	%
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>171.067.216,00</b>	<b>171.067.216,00</b>	<b>100%</b>
<b>1.1</b>	<b>Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>77.397.985,00</b>	<b>77.397.985,00</b>	<b>100%</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35.856.594,00	35.856.594,00	100%
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12.231.008,00	12.231.008,00	100%
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	20.634.264,00	20.634.264,00	100%
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.676.119,00	8.676.119,00	100%
<b>1.2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>29.824.418,00</b>	<b>29.824.418,00</b>	<b>100%</b>
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.100.000,00	1.100.000,00	100%
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	28.724.418,00	28.724.418,00	100%
<b>1.3</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0,00	0,00	0
<b>1.4</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>29.593.043,00</b>	<b>29.593.043,00</b>	<b>100%</b>
1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.140.000,00	10.140.000,00	100%
2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.505.000,00	5.505.000,00	100%



3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13.948.043,00	13.948.043,00	100%
<b>I.5</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>16.289.170,00</b>	<b>16.289.170,00</b>	<b>100%</b>
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.289.170,00	16.289.170,00	100%
<b>I.6</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>17.962.600,00</b>	<b>17.962.600,00</b>	<b>100%</b>
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.548.100,00	5.548.100,00	100%
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	12.414.500,00	12.414.500,00	100%
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENATAAN ORGANISASI</b>	<b>9.345.871,00</b>	<b>9.345.871,00</b>	<b>100%</b>
<b>II.1</b>	<b>Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan</b>	<b>9.345.871,00</b>	<b>9.345.871,00</b>	<b>100%</b>
1	Penataan Analisis Jabatan	9.345.871,00	9.345.871,00	100%
<b>III</b>	<b>PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</b>	<b>660.831.293,00</b>	<b>659.543.372,00</b>	<b>99,81%</b>
<b>III.1</b>	<b>Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>346.660.922,00</b>	<b>346.660.922,00</b>	<b>100%</b>
1	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	71.782.064,00	71.782.064,00	100%
2	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	62.122.592,00	62.122.592,00	100%
3	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	212.756.266,00	212.756.266,00	100%
<b>III.2</b>	<b>Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>314.170.371,00</b>	<b>312.882.450,00</b>	<b>99,59%</b>
1	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	107.941.931,00	106.654.010,00	98,81%
2	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	151.979.784,00	151.979.784,00	100%
3	Fasilitas Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	54.248.656,00	54.248.656,00	100%
	<b>TOTAL</b>	<b>841.244.380</b>	<b>839.956.459,00</b>	<b>99,85%</b>



Dari rincian Anggaran diatas, hampir seluruh kegiatan terlaksana sesuai harapan, dengan realisasi anggaran rata-rata 99,85%. Dalam rangka mewujudkan sasaran strategis, didukung dengan pagu anggaran total Rp. 839.956.459,00 atau sekitar 99,85 %, melalui 9 (sembilan) kegiatan.



### **BAB III**

## **HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH**

### **3.1 Pelaksanaan Urusan**

Biro Administrasi Pembangunan merupakan unit kerja pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan salah satu unit kerja administratif yang bertugas merumuskan dan mengkoordinasikan kebijakan-kebijakan bidang pengendalian administrasi pembangunan daerah, pengendalian administrasi pembangunan wilayah, serta pelaporan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mendukung pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro Administrasi Pembangunan tidak terpaku pada salah satu ataupun beberapa Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib/Pilihan saja, namun sebagai pendukung semua Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan baik Urusan Wajib maupun Urusan Pilihan.

Biro Administrasi Pembangunan pada tahun anggaran 2021 melaksanakan tugas, fungsi dan tata kerja melalui 3 (tiga) program strategis dengan 9 (sembilan) kegiatan didalamnya. Melalui program dan kegiatan tersebut, total pagu secara keseluruhan dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) 2021 berjumlah Rp. 841.244.380,00 dengan realisasi mencapai Rp. 439.956.459,00 atau sekitar 99,85 %.



Tabel 3.1

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	Urusan Pendukung	Biro Administarsi Pembangunan Setda Prov. Kalbar	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Terintegrasi		100%	99,85%			
				<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>					
				<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>					
				1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	
				2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			
				3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen			
				4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen			



				<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>					
				1. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Tahun	1 Tahun			
				2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/semesteran SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			
				<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>					
				1. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Tahun	1 Tahun			
				<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>					
				1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Tahun	1 Tahun			
				2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Tahun	1 Tahun			
				3. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 Laporan	7 Laporan			
				<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					
				1. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	1 Tahun	1 Tahun			
				<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					



				1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Tahun	1 Tahun			
				2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	1 Tahun	1 Tahun			
				<b>PROGRAM PENATAAN ORGANISASI</b>					
				<b>Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan</b>					
				1 Penataan Analisis Jabatan	1 Dokumen	1 Dokumen			
				<b>PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</b>					
				<b>Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah</b>					
				1. Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen			
				2. Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	1 Dokumen	1 Dokumen			
				3. Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	1 Dokumen	1 Dokumen			



				<b>Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah</b>					
				1 Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen			
				2 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen			
				3 Fasilitasi Kebijakan Daerah Perumusan Pembangunan	1 Dokumen	1 Dokumen			



### 3.2 Kebijakan Strategis Yang Dilaksanakan

Tabel 3.2

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	= NIHIL =		

### 3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Untuk tahun 2021 maupun tahun anggaran sebelumnya Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat tidak mendapat tindak lanjut rekomendasi dari DPRD.

Tabel 3.3

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	= NIHIL =		



## BAB IV

### CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, dijelaskan bahwa Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

Dapat disampaikan bahwa untuk tahun anggaran 2021, Biro Administrasi Pembangunan tidak menerima/memberikan Tugas Pembantuan sebagaimana yang dimaksud di atas.

#### 4.1 Urusan Pemerintahan Yang Ditugas Pembantuan **(Tidak Ada)**

4.1.1 Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diterima Kepada Pemerintah Pusat

4.1.2 Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diterima Kepada Pemerintah Kabupaten/kota

#### 4.2 Hambatan/Permasalahan Dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian **(Tidak Ada)**



## BAB V

### PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun 2021 Biro Administrasi Pembangunan merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja mengenai urusan Pengendalian Administrasi Pembangunan yang menjadi

tugas dan fungsi Biro Administrasi Pembangunan selama tahun 2021.

Sebagai unit kerja penunjang dibawah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan unit kerja administratif, Biro Administrasi Pembangunan tidak secara langsung mengemban atau menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib/Pilihan tertentu. Biro Administrasi Pembangunan dalam pelaksanaan tugasnya bertindak sebagai unit kerja yang bertugas merumuskan, memfasilitasi, mengkoordinasikan dan memonitoring kebijakan-kebijakan dan pelaksanaan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan yang bersifat penunjang.

Dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam pencapaian sasaran diatas, adanya hambatan/kendala tidak dapat dihindari sehingga seluruh komponen organisasi bekerja dengan maksimal baik dalam hal antisipasi maupun pemecahan solusi guna pencapaian kinerja yang optimal baik pada tahun berjalan dan tahun yang akan datang.

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan, selanjutnya atas nama Biro Administrasi Pembangunan

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam penyusunan LKPJ ini, Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmat kepada kita semua.

